

## **ANALISIS DANA PERIMBANGAN DAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI PROVINSI JAWA TIMUR 2015-2017**

**Sasha Nadya Chairunnisa, M. Faisal Abdullah**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fkultas Eknomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl.Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

\* Corresponding author: [sashanadya24@gmail.com](mailto:sashanadya24@gmail.com)

---

### **Artikel Info**

#### *Article history:*

Received 20 June 2019

Revised 15 July 2019

Accepted 19 July 2019

Available online 23 July 2019

---

**Keyword:** *Tax, Expenditure*

JEL Classification

---

### **Abstract**

*This research was aims to determine the contribution of balancing fund and local taxes on regional expenditure in East Java Province and to determine the effect of balancing funds and regional taxes on direct expenditure in East Java Province.*

*The type of data used is secondary data, namely the realization of the regional budget for a period of 3 years, in 2015-2017 obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance. The data analysis techniques of this study were panel regression analysis, contribution analysis and classic assumption test. Results analysis obtained by contribution of balancing funds to regional expenditure in quite high in each district and city in East Java Province. Regional tax contributions to regional expenditure are still low in every district and city in East Java Province. The results showed that balancing fund had a positive and significant effect on the district and city direct spending in East Java and the local tax also had a positive and significant effect on the direct spending of districts and cities in East Java Province.*

---

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang dapat dilihat melalui alokasi belanja daerah (Kaat, Kindangen & Rotinsulu, 2015). Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan daerah dalam bentuk program-program dan kegiatan dengan tujuan agar dapat langsung menyentuh sektor produktif masyarakat. Pemerintah daerah tentunya harus mampu mengelola anggaran pendapatan belanja untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dari setiap kabupaten dan kota. Melalui fleksibilitas manajemen keuangan diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi (Kusuma, 2016). Dapat dilihat besaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah tahun 2015-2017.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017**

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
2015	22.228.450.227.975	22.946.307.569.746
2016	24.962.122.477.070	23.859.953.926.118
2017	29.864.031.011.506	28.878.134.635.609

*Sumber* : Realisasi APBD Kota Provinsi Jawa Timur 2015-2017

Peningkatan belanja daerah ini dapat dilihat pada Provinsi Jawa Timur tahun 2015 belanja daerah sebesar 23.859.953.926.118, dan pada tahun 2016 terjadi surplus sebesar 1,86 triliun. Pada tahun 2017 sebesar 28.878.134.635.609, dan pada tahun ini juga terjadi surplus sebesar 0,9 triliun. Perubahan jumlah pengalokasian belanja digunakan untuk melaksanakan program perbaikan, pelayanan atau pengembangan fasilitas umum dalam menunjang kebutuhan masyarakat (Abdullah, 2018).

Pengeluaran pemerintah melalui Belanja Langsung merupakan salah satu bagian penting dalam penganggaran. Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan yang direncanakan dan disetujui oleh pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal Pemanfaatan belanja hendaknya ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dalam membiayai kebutuhan daerah setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda beda, sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana perimbangan untuk membantu dalam pendanaan setiap daerah. Kebutuhan setiap daerah yang bervairasi yaitu dengan melihat belanja daerah yang ditunjukkan untuk pelaksanaan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Perimbangan keuangan antar pusat dan daerah diwujudkan melalui dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan khusus kepada daerah untuk menunjang kegiatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang dibiayai atas beban APBD (Nabilah, Soelistyo, & Kusuma, 2014). Dana Perimbangan sangat berperan terhadap pembangunan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat kontribusi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang tertera dalam tabel Realisasi DAU dan DAK Tahun 2015-2017.

**Tabel 2. Realisasi DAU dan DAK**

Tahun	DAU	DAK
2015	1.587.261.707.000	66.039.190.000
2016	1.672.878.372.000	5.516.240.624.514
2017	1.767.867.258.000	3.791.526.989.560

*Sumber* : Realisasi APBD Kota Provinsi Jawa Timur 2015-2017

Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada tahun 2016 naik sebesar 5,03%. Kontribusi terbesar pada Dana Alokasi Umum yaitu, pada tahun 2017 sebesar 1.767.867.258.000. Dana Alokasi Khusus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, kontribusi terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar 5.516.240.624.514. Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan seharusnya menjadi intensif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Bantuan pemerintah pusat atau transfer dana dari pusat harus diarahkan agar dana, sarana dan prasarana yang diberikan kepada daerah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui potensi pendapatan yang diperoleh dan dinikmati oleh masyarakat (Sudarti, 1998).

Dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan daerah yaitu pajak daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa (Melas, 2017). Dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan daerah, pemerintah provinsi harus berupaya untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerahnya, khususnya pusat-pusat kegiatan produksi yang dianggap cukup strategis yang ada di masing-masing kabupaten/kota (Malik, 2012). Penerimaan pajak daerah seharusnya dialokasikan untuk belanja yang bersifat produktif, yaitu salah satunya melalui belanja langsung yang dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan dan penyediaan barang-barang publik lain.

Peran penerimaan pajak daerah sangat besar dalam membiayai belanja daerah khususnya belanja langsung. Melalui belanja langsung tersebut pajak daerah digunakan pelayanan masyarakat dan membiayai pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya harus dapat dioptimalkan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu Seberapa Besar perbedaan Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.

Pada penelitian yang dilakukan Samau dan Rumat (2016) dengan judul “Analisis Kontribusi Serta Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”, dengan metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan DAU terhadap Belanja Pegawai dan adanya pengaruh positif DAU terhadap Belanja Modal akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Dan juga dapat dilihat kegiatan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe 68,14% pendanaannya bersal dari DAU, tetapi ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tiap tahunnya semakin berkurang.

Penelitian yang dilakukan Dewi & Budhi,(2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung Di Provinsi Bali”, dengan metode path analysis dan uji Sobel. Hasil analisis adanya pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung dan Dana Bagi Hasil tidak

berpengaruh langsung terhadap Belanja langsung. Adanya pengaruh langsung Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung.

Penelitian yang dilakukan Lestari, Bagia, & Jana (2015) dengan judul “Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”, dengan metode path analysis. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja langsung. Adanya pengaruh negatif dana bagi hasil terhadap belanja langsung, adanya pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja langsung, adanya pengaruh negatif dana alokasi khusus terhadap belanja langsung. Dalam penelitian ini relevansi dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih membahas tentang belanja langsung dimana membahas lebih lanjut realisasi anggaran APBD tiap tahunnya. Dalam penelitian ini menambahkan variabel Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, yang akan dilihat pengaruhnya terhadap Belanja Langsung dan kontribusinya dalam Belanja Daerah.

Belanja daerah diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa belanja daerah di bagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Dalam rangka mendanai belanja pemerintah dibutuhkan sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu berasal dari Dana Perimbangan dan Pajak Daerah. Sumber penerimaan daerah dalam konteks ekonomi dan desentralisasi masih didominasi oleh bantuan pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan (Mardiasmo, 2016). Pajak daerah adalah salah satu penerimaan yang digunakan untuk pembangunan daerah. Menurut Halim (2014) Penggunaan Pajak ditujukan untuk pelayanan masyarakat, pelayanan tersebut berbentuk pelayanan infrastruktur, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Penggunaan pajak tersebut dapat pula dirinci sebagai penggunaan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini jenis penelitian menggunakan data kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu menggunakan data yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK), dan literatur tentang manajemen keuangan daerah, otonomi daerah dan perpajakan. Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari data realisasi anggaran pemerintah daerah per kabupaten dan kota di Provinsi Jawa

Timur tahun 2015-2017, data realisasi dana perimbangan, data realisasi pajak daerah, dan data realisasi belanja langsung dan belanja daerah.

Populasi dan sampel yang digunakan adalah populasi 38 kabupaten dan kota dengan metode sampel sensus yaitu seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan data panel. Variabel yang diteliti adalah Belanja Langsung (Y) di Provinsi Jawa Timur yang diukur melalui dana perimbangan (X1), dan pajak daerah (X2). Belanja

Langsung yaitu belanja yang dianggarkan secara langsung dengan penyelenggaraan program dan kegiatan daerah di Provinsi Jawa Timur. Pajak Daerah yaitu jumlah pajak daerah yang diterima dalam bentuk realisasi anggaran di Provinsi Jawa Timur. Dana perimbangan yaitu jumlah dana bantuan dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Metode Analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis regresi data panel, dan uji asumsi klasik untuk menganalisis data. Metode Analisis data panel dengan tiga pendekatan yaitu Metode *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect* (FE), *Random Effect* (RE), dengan Uji hipotesis *Uji Chow*, *Uji Hausman*, *Uji Ln Breush Pagan*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil Analisis Kontribusi dapat diketahui nilai kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah tahun 2015 tertinggi pada kabupaten Probolinggo sebesar 76%, yang kedua tertinggi pada kabupaten Bojonegoro sebesar 69% dan yang ketiga tertinggi pada Kota Kediri sebesar 69%. Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat kontribusi yang tinggi diantara kabupaten lainnya, yang artinya dana perimbangan di Kabupaten Probolinggo sangat berperan penting dalam Belanja Daerah. Pada tahun 2016, kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah tertinggi pada Kabupaten Trenggalek sebesar 80%, yang kedua tertinggi pada Kabupaten Jember yaitu sebesar 76%. Pada tahun 2017 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah tertinggi adalah pada Kabupaten Pamekasan 78%, artinya Kabupaten Pamekasan memiliki kontribusi yang tinggi, yang kedua tertinggi pada Kabupaten Magetan sebesar 76%, yang ketiga tertinggi pada Kota Batu sebesar 76%.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada tahun 2015 paling tinggi pada Kota Surabaya sebesar 40%, yang kedua pada kabupaten Sidoarjo sebesar 19%, dan yang ketiga tertinggi pada Kabupaten Gresik dan Kota Malang sebesar 18%. Pada tahun 2016 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah tertinggi adalah pada Kota Surabaya sebesar 42%. Kedua tertinggi pada Kota Malang, kontribusi Pajak Daerah di Kota Malang meningkat di tahun sebelumnya sebesar 22% dan yang ketiga pada kabupaten Sidoarjo sebesar 20%. Kontribusi Pajak daerah terhadap Belanja Daerah tahun 2017 tertinggi pada Kota Surabaya sebesar 45%, artinya kontribusi Pajak daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Surabaya tinggi. Pajak Daerah pada Kota Surabaya pada tahun 2016, juga memiliki kontribusi yang tinggi, kontribusi pajak daerah terhadap Belanja Daerah ini pada tahun 2016 naik

sebesar 3%. Kedua tertinggi Kabupaten Sidoarjo sebesar 25% dan yang ketiga Kota Malang 23%.

Rata-Rata Kontribusi Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada tahun 2015 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 32%, dan rata-rata kontribusi Pajak daerah terhadap Belanja Daerah di seluruh kabupaten dan Kota yaitu sebesar 6%. Rata-Rata kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di seluruh Kabupaten dan Kota tahun 2015 sebesar 59%.

Rata-Rata Kontribusi Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada tahun 2016 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 35%, dan rata-rata kontribusi Pajak daerah terhadap Belanja Daerah di seluruh kabupaten dan Kota yaitu sebesar 6%. Rata-Rata kontribusi Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di seluruh Kabupaten dan Kota tahun 2016 sebesar 65%.

Rata-Rata Kontribusi Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada tahun 2017 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 36%, rata-rata kontribusi ini naik sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di seluruh kabupaten dan Kota yaitu sebesar 7%. Rata-Rata kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di seluruh Kabupaten dan Kota tahun 2017 sebesar 64%, sedangkan Rata-Rata kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di seluruh Kabupaten dan Kota tahun 2017 turun sebesar 1% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3. Hasil Model Common Effect**

Variabel	Koefisien	Prob
C	9.99	0.0131
Dana Perimbangan	0.469271	0.0000
Pajak Daerah	1.153.467	0.0000
R-squared	0.961181	92.011
Adjusted R-squared	0.960481	68.511
F-statistic	1.374.208	5.416.731
Prob(F-statistic)	0.000000	1.466.335

Sumber : Data olahan eviews 9 (2019)

Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 9.99 menjelaskan bahwa ketika dana perimbangan dan pajak daerah konstan atau sama dengan nol maka Belanja Langsung akan naik sebesar 9.99% Koefisien dana perimbangan sebesar 0.469271, Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dana perimbangan terhadap Belanja Langsung. Koefisien Pajak daerah sebesar 1.153467, Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara pajak daerah dan belanja langsung.

**Tabel 4. Hasil Model Uji F**

F-hitung	F- tabel	Keterangan
1374.208	3.08	Signifikan

Sumber : Data olahan eviews 9 (2019)

Berdasarkan hasil regresi data panel nilai F-hitung sebesar 1374.208 dan nilai F tabel sebesar 3.08. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel sehingga diputuskan untuk menolah H0 dan menerima H1. Oleh karena itu disimpulkan bahwa variabel Dana perimbangan dan Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.

**Tabel 5. Hasil Model Uji-t**

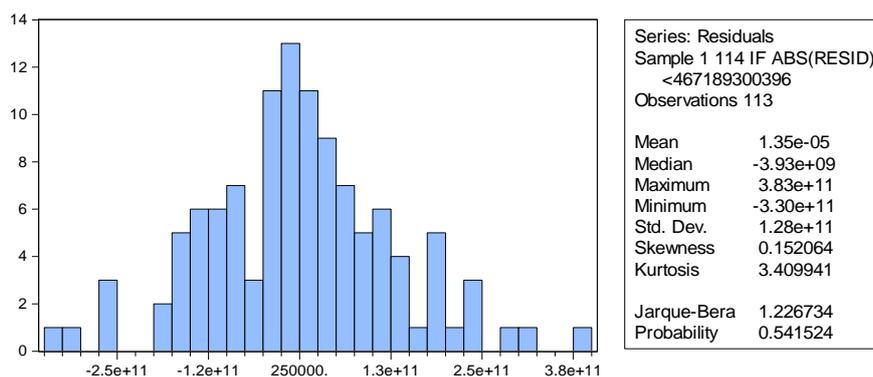
Variabel	t- hitung	t- tabel	Keterangan
<b>Dana Perimbangan</b>	15.41019	1.65870	Signifikan
<b>Pajak Daerah</b>	43.96727	1.65870	Signifikan

Sumber : Data olahan eviews 9 (2019)

Berdasarkan hasil uji t, nilai t-hitung untuk variabel Dana Perimbangan adalah 15.41019 dan nilai t tabel sebesar 1.65870. Disimpulkan bahwa variabel Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Langsung. Berdasarkan hasil hasil uji t, nilai t-hitung untuk variabel Pajak Daerah sebesar 43.96727 dan nilai t tabel sebesar 1.65870. Disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Langsung.

### Uji Normalitas

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**



Sumber : data olahan eviews 9 (2019)

Dari Hasil Uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai JB sebesar 1.226734 dengan probabilitas 0.541524. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

	Dana Perimbangan	Pajak Daerah
Dana Perimbangan	1.000000	0.274066
Pajak Daerah	0.274066	1.000000

*Sumber* : data olahan eviews 9 (2019)

Dari Hasil Uji Multikolinearitas, diperoleh nilai kolerasi antar prediktor menunjukkan kolerasi yang rendah antar variabel yaitu  $< 0.90$  dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam data ini.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.144.728	Prob. F(2,111)	0.0000
Obs*R-squared	1.949.280	Prob. Chi-Square(2)	0.0001
Durbin-Watson stat			1.984.872

*Sumber* : data olahan eviews 9 (2019)

Dari Hasil Uji Heteroskedastisitas pada tabel diatas dapat diketahui nilai Obs\*R-squared sebesar 1.949.280 dengan probabilitas sebesar 0.0001, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas pada model tersebut.

### Uji Autokolerasi

**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.553.373	Prob. F(2,109)	0.0825
Obs*R-squared	5.101.968	Prob. Chi-Square(2)	0.0780
Durbin-Watson stat			1.988.580

*Sumber* : data olahan eviews 9 (2019)

Hasil Uji autokolerasi diketahui bahwa nilai statistik D-W sebesar 1.988.580. Dalam penelitian ini n sebanyak 114 dan memiliki 2 variabel bebas, maka nilai du sebesar 1.7303 dan nilai dl sebesar 1.6590. Hal ini menunjukkan bahwa gagal tolak H0 atau tidak adanya autokolerasi.

### Pengaruh Dana Perimbangan dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Langsung

Dana Perimbangan dan Pajak Daerah merupakan sumber dana yang digunakan dalam alokasi Belanja Daerah salah satunya melalui Belanja Langsung. Semakin tinggi Dana perimbangan dan Pajak daerah maka Belanja Langsung juga akan meningkat, Ini didukung oleh teori dari Widjaja, (2009) yang menyatakan bahwa Transfer dana yang berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal

pemerintah pusat secara umum akan semakin berkurang, tetapi proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam.

Hal ini juga didukung penelitian Lestari et al., (2015) dana bagi hasil (DBH), dana alokasi Umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Semakin besar nilai dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat maka daerah tersebut masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung**

Dana Perimbangan ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yaitu salah satunya Belanja Langsung. Dana Perimbangan merupakan bagian dari penerimaan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan daerah yaitu melalui belanja. Hal ini didukung teori menurut Badrudin, (2012) secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran pemerintah, namun tidak seluruh pendapatan akan dialokasikan untuk belanja. Hal ini juga didukung dengan penelitian dari Dewi & Budhi, (2013) yaitu menunjukkan adanya pengaruh positif antara jumlah penduduk, dana perimbangan, investasi secara tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung**

Pajak daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah salah satunya melalui Belanja Langsung. Menurut Halim (2014) Pajak daerah ini penggunaannya dapat dirinci untuk penggunaan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja hibah dan belanja lain-lain. Ini juga didukung oleh penelitian Montolalu, Rotinsulu, & Tumangkeng (2017) yaitu menunjukkan adanya pengaruh linier antara pendapatan pajak terhadap belanja langsung. Pendapatan pajak tidak bisa menjelaskan signifikan perubahan pada belanja langsung secara partial. Hal ini menunjukkan pendapatan pajak memiliki pengaruh yang cukup besar bagi alokasi belanja langsung tetapi tidak secara signifikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini untuk melihat kontribusi Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah serta pengaruh Dana Perimbangan dan Pajak daerah terhadap pengeluaran pemerintah yaitu melalui Belanja Langsung. Dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Langsung dan masih memiliki peran yang cukup besar dalam membiayai belanja daerah, artinya bahwa dana perimbangan bahwa daerah tersebut bergantung pada pemerintah pusat. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Pajak Daerah dapat menjadi pendapatan yang potensial dan memiliki peran yang besar dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi bagaimana pemerintah mengatur dengan cukup baik dengan demikian peranan pajak tersebut dapat optimal.

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur sangat tinggi, dan terus meningkat setiap tahunnya ini menunjukkan bahwa kabupaten beserta kota di Jawa Timur masih belum mandiri dan karena sebagian besar pengeluaran pemerintah masih dibiayai transfer dana dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan. Besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah dalam setiap tahunnya masih rendah. Dengan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menggali potensi-potensi di daerahnya. Pemerintah daerah perlu mengintensifkan pemungutan pajak daerah, dengan upaya ini diharapkan daerah mampu membiayai pengeluaran daerah sehingga Provinsi Jawa Timur lebih mandiri.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka perlu disampaikan beberapa saran yaitu penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data dengan waktu yang terbaru, dan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang agar hasil dari penelitian tersebut lebih akurat. Diharapkan dengan penelitian ini, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah, mampu mengoptimalkan Pajak Daerah untuk pengalokasian Belanja Langsung di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan penelitian ini, mampu memudahkan pemerintah mengambil kebijakan dan dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan masing-masing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. F. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Pdrb Di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 1–13.

Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Dewi, N. W. N., & Budhi, M. K. S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Langsung Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP*, 1391–1420.

Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Kaat, M. H., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015. 1–18.

Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9(No. 1), 2.

Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2015). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( Apbn ) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *E-Journal Bisma*, 3(1).

Malik, N. (2012). Model Pengukuran Kinerja Ekonomi Dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 2(1).

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Melas, A. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). *E Jurnal Katalogis*, 5(4), 44–55.

Montolalu, N., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. . (2017). Pengaruh pendapatan pajak dan retribusi terhadap belanja langsung serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di kota manado. 17(01), 157–170.

Nabilah, A. N., Soelistyo, A., & Kusuma, H. (2014). Analisis Flypaper Effect Pada Dan Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan keuangan daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017

Sudarti. (1998). Otonomi Daerah Dan Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.

Widjaja, H. (2009). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.